



KADIN *NEWS*

VOL. 1 | AGUSTUS 2023

01

Optimalisasi Sinergi BUMN dan Swasta,
Kunci Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

02

Gelaran ICEF 2023:
Wujud Kolaborasi Pemerintah dan
Pelaku Usaha Dorong Produk
Dalam Negeri

03

Kabar Pengukuhan
Kadin Kalimantan Timur

Kadin Indonesia

Gelar Upacara HUT ke-78 RI di IKN

Daftar Isi

SOROTAN BULANAN

01	Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia	Pameran	03
34	Manfaat Keanggotaan Kadin	Seminar	06
35	Cara Pendaftaran Anggota Kadin	Rapat Internal	11
36	Fitur Terbaru Website Kadin	Kunjungan Internasional	15
37	Kabar Terkini: Undang-undang Kesehatan	Penandatanganan Nota Kesepahaman	20
39	Kabar Terkini: Devisa Hasil Ekspor	Kadin Impact Award	24
42	Acara Mendatang	Engagement dengan Kementerian dan Lembaga	26
43	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin for Naker	Liputan Khusus	32
44	Inisiatif Kadin Indonesia: Wiki Wirausaha		
45	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin Net Zero Hub		

SAMBUTAN KETUA UMUM

Kadin Indonesia



Pelaksanaan upacara perayaan HUT ke-78 RI bersama Kepala Otorita IKN merupakan bentuk nyata komitmen Kadin Indonesia akan masa depan Indonesia yang sejahtera dan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia.

**Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya,
Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua**

Tidak terasa, bulan kedelapan tahun ini sudah kita lalui dengan baik. Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga banyak kegiatan dan agenda penting bagi Kadin Indonesia telah berhasil dilaksanakan selama satu bulan berlalu. Puji dan syukur terucap pula karena pada akhirnya, berkat kerja keras dan dukungan banyak pihak, dan mengambil momen kebersamaan 2023 dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, berhasil tersusun newsletter pertama Kadin Indonesia di tahun ini. Melalui newsletter ini, kami ingin menyampaikan rangkuman seluruh agenda Kadin Indonesia yang telah dilakukan oleh Bapak/Ibu dan seluruh anggota selama satu bulan.

Tergambar pada halaman awal newsletter ini, salah satu kegiatan yang sudah sukses dilaksanakan selama bulan Agustus 2023, yaitu pelaksanaan upacara perayaan HUT ke-78 Republik Indonesia yang terlaksana di Ibu Kota Negara Nusantara. Pelaksanaan upacara perayaan HUT ke-78 RI bersama Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono ini merupakan bentuk nyata komitmen Kadin Indonesia akan masa depan Indonesia yang sejahtera dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia.

Melalui newsletter ini, kami juga akan secara lengkap dan menarik, merangkum seluruh agenda kegiatan dari Kadin Indonesia yang telah terlaksana selama satu bulan yang lalu. Semoga melalui newsletter yang Bapak/Ibu dan saudara/i baca saat ini, seluruh kerja keras dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kadin Indonesia dapat tersampaikan dengan baik untuk diketahui dan menjadi referensi demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.

Akhir kata, mari kita dukung bersama program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kadin Indonesia.

Salam,

M. Arsjad Rasjid P. M.

Ketua Umum Kadin Indonesia

Sorotan Kegiatan **Bulan Ini**



PAMERAN



SEMINAR



RAPAT
INTERNAL



KUNJUNGAN DELEGASI
INTERNASIONAL



PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN



KADIN
IMPACT AWARD



ENGAGEMENT
KEMENTERIAN DAN
LEMBAGA



LIPUTAN KHUSUS



PAMERAN

Gelaran ICEF 2023: Wujud Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Dorong Produk Dalam Negeri

Pemerintah berupaya untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan produk dalam negeri guna menumbuhkan kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global. Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu wujud nyata upaya pemerintah dalam membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.

Untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belanja Produk Dalam Negeri (PDN) diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bersama Kadin Indonesia menyelenggarakan acara Temu Bisnis (*Business Matching*) Tahap VI yakni Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) pada 3-5 Agustus 2023 di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran.



Dengan tema "Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa", pameran dan forum ini diresmikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. "Tema ini selaras dengan semangat peringatan hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, serta mengamplifikasi semangat aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang telah digaungkan oleh Bapak Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022," ujar Sri Mulyani dalam sambutannya.



Pada gelaran ICEF, Kadin Indonesia berpartisipasi dengan aktif untuk memberikan ide dan pemikiran melalui para pengurus Kadin Indonesia yang menjadi pembicara dalam beberapa forum. Dalam kesempatan ini, Kadin Indonesia juga berkesempatan untuk membuka *booth* sebagai upaya untuk memperkenalkan kehadiran Kadin Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, dan WKU Bidang Kewirausahaan, Aldi Haryoprato, secara terpisah menjadi pembicara dalam forum tersebut. Forum dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu *showcase* dari sembilan proyek perusahaan BUMN, dua sesi panel diskusi, dan dilanjutkan dengan tiga *breakout session* yang membahas sektor infrastruktur dan logistik, transisi energi dan hilirisasi tambang, serta kesehatan.



*Sinergi sektor Swasta dan BUMN serta pemerintah memiliki peranan penting dalam mendorong **inklusi** dan keberlanjutan pembangunan Indonesia terutama dalam mencapai target **Indonesia Emas 2045**.*

- Arsjad Rasjid dalam sambutannya di gelaran ICEF 2023

Gelaran ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat dan memajukan industri nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Seusai gelaran ICEF 2023, Kadin Indonesia bersama BUMN akan menggagas *blueprint* sinergi BUMN-Swasta dalam dua bulan mendatang yang akan menjadi panduan bagi kerja sama yang lebih optimal dan efisien. Kadin Indonesia berencana akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dalam waktu dekat untuk menyusun *blueprint* sebagai inisiatif untuk mendorong sinergi yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Indonesia SME Summit and Expo (ISSE)

Kadin Indonesia Wujudkan Bentuk Konkret Pemberdayaan UMKM melalui Kerjasama Kemitraan

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,5 persen dan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Sementara itu, dari sisi struktur ekonomi saat ini, jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 99,6 persen dari keseluruhan unit usaha. Oleh karena itu, penting untuk mengubah struktur ekonomi tersebut, dengan cara mendorong semakin naiknya skala ekonomi mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi usaha besar. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah kini tengah membangun struktur ekonomi yang kuat dan UMKM berdaya saing serta membangun sinergi kolaborasi demi mewujudkan UMKM naik kelas.

“UMKM naik kelas” merujuk pada langkah-langkah dan upaya yang diambil oleh UMKM untuk meningkatkan kapabilitas dan meningkatkan posisinya di pasar. Bahkan hingga tahun 2024, Kementerian Koperasi dan UMKM menargetkan UMKM bisa melantai di Bursa Efek Indonesia.

Sejalan dengan komitmen untuk mengembangkan kapasitas para pelaku UMKM agar mampu naik kelas, Kadin Indonesia mendukung pelaksanaan Indonesia SME Summit and Expo (ISSE) yang diselenggarakan pada 29–31 Agustus 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD.

Apa sih gunanya Chamber of Commerce (Kadin) untuk Wirausaha?



ISSE 2023 merupakan ajang pameran dagang yang mempertemukan puluhan ribu UMKM dengan para *stakeholders* yang dapat membantu mereka untuk naik kelas melalui pelatihan yang digelar, *match-making* pendanaan atau modal kerja, pembukaan akses pasar, juga *mentorship*. Gelaran ini memungkinkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dalam mengembangkan usaha, termasuk dengan memahami tren perkembangan pasar digital.

Pada gelaran ini juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra untuk pelatihan dan pemberdayaan UMKM, di antaranya dengan Desty App, Justika, Indonesia Coffee Academy, Sarinah, dan Daya Dimensi dalam mengakselerasi digitalisasi UMKM.



SEMINAR

Isu Keamanan Siber Kian Penting, Kadin Indonesia Perkuat Dialog dengan BSSN



Ancaman keamanan siber di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Serangan siber seperti peretasan, *malware*, dan serangan *phishing* semakin sering terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintah, bisnis, dan lembaga pendidikan.

Laporan National Cyber Security Index (NCSI) mencatat, skor indeks keamanan siber Indonesia sebesar 38,96 poin dari 100 pada 2022. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-3 terendah di antara negara-negara G20. Dengan skor keamanan siber yang rendah, sektor swasta dan bisnis menjadi lebih rentan terhadap serangan siber.

Sebagai organisasi yang mewakili sektor swasta dan bisnis di Indonesia, Kadin Indonesia turut berupaya dalam mengatasi tantangan ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghadiri audiensi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 2 Agustus 2023 untuk membahas isu keamanan siber dan pembentukan Tim Cyber Security Incident Response Team (CSIRT).

Audiensi ini dihadiri oleh WKU Bidang Kominfo, Firlie H. Ganinduto, Badan Penegakkan Hukum dan Pertahanan Keamanan Kadin Indonesia, PT. Pos Indonesia, dan Sekretariat Kadin Indonesia. Audiensi tersebut menyoroti pentingnya memperkuat sektor infrastruktur digital, meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital, dan melindungi dari ancaman siber.

SEMINAR

Kadin Indonesia Dukung Pemerintah Dorong Peningkatan Penggunaan Kendaraan Listrik



Peningkatan signifikan jumlah kendaraan di Indonesia dinilai membanggakan sekaligus mengkhawatirkan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan jumlah kendaraan di Indonesia naik sekitar 11,5 persen per tahun, sementara pertumbuhan ekonomi sebanyak 5 persen. Perbandingan tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan di tanah air jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

(lanjutan di halaman 7)

Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai tantangan seperti polusi, tingginya kebutuhan akan bahan bakar minyak (BBM), dan infrastruktur transportasi yang mungkin tidak cukup mengikuti pertumbuhan jumlah kendaraan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu mencari solusi yang berkelanjutan. Kendaraan listrik menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berpotensi mengurangi ketergantungan pada BBM. Pada tahun 2023 ini, pemerintah menargetkan penjualan 200 ribu unit motor listrik. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan strategi matang dari pihak pemerintah dan swasta.

Dalam rangka membahas strategi kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk mendorong pemanfaatan kebijakan motor listrik serta mencapai target penjualan 200 ribu unit, Pengurus Bidang Perindustrian menghadiri audiensi dengan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, pada 11 Agustus 2023 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Audiensi ini dilakukan mengingat pentingnya sosialisasi mengenai program insentif pembelian motor listrik bagi konsumen dan syarat-syarat pembelian motor listrik kerap memberatkan konsumen.

SEMINAR

Segera Hadir Buku Panduan ESG Kadin Indonesia, Pokja Sustainability Inisiasi Focus Group Discussion

Environmental, Social and Governance (ESG) menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan bagi dunia usaha, baik perusahaan besar maupun UMKM. Bagi perusahaan publik, sulit untuk menghindari dari penilaian kinerja ESG oleh Bursa Efek, Lembaga Rating, Lembaga Ranking, ataupun penyelenggara Award ESG. Oleh sebab itu, konsep ESG termasuk pengungkapannya harus dipahami oleh seluruh jenis perusahaan.

Menyadari pentingnya ESG dalam dunia bisnis, Kadin Indonesia membentuk Kelompok Kerja (Pokja) ESG yang bertugas menyusun suatu Panduan ESG Umum (ESG 101) untuk semua jenis industri, atau sector agnostic.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep ESG kepada para pelaku usaha, Pokja Sustainability Kadin Indonesia mengadakan acara workshop dan Focus Group Discussion (FGD). Pada pertemuan ini, Kadin Indonesia mempresentasikan dan mendiskusikan rancangan buku Panduan ESG Kadin Indonesia.

FGD dilaksanakan pada 11 Agustus 2023. Nantinya, Buku Panduan ESG ini akan dibagikan kepada para pelaku usaha sebagai rujukan dalam meningkatkan *rating* dan daya kompetisi di mata investor, lembaga keuangan, dan pasar.





SEMINAR

Optimalisasi Sinergi BUMN dan Swasta, Kunci Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Memasuki era kebangkitan ekonomi dalam negeri, kolaborasi antara Swasta dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan ekosistem perekonomian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini telah terwujud pada periode Covid-19, lewat kolaborasi yang sangat baik antara Pemerintah, BUMN, dan Sektor Swasta dalam memitigasi dampak pandemi dan mendorong pemulihan berhasil menjaga perekonomian tetap stabil.

Sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi ini, Kadin Indonesia dan Kementerian BUMN menggelar Forum Sinergi BUMN-Swasta dengan tema “Kolaborasi untuk Pembangunan Inklusif” pada 14 Agustus 2023 di Grand Ballroom, Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Turut hadir Menteri BUMN beserta jajaran Kementerian BUMN dan Ketua Umum Kadin Indonesia beserta WKU Koordinator.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, “Sinergi antara BUMN dan swasta memang menawarkan potensi yang besar, terutama dalam mencapai target Indonesia keluar dari middle income-trap dan masuk sebagai salah satu dari 5 besar ekonomi dunia pada tahun 2045. Meski demikian, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa sinergi antara BUMN dan swasta belum berjalan optimal dan masih menghadapi berbagai kendala,” ujar Arsjad.

(lanjutan di halaman 9)

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan forum yang mengangkat tema Kolaborasi untuk Pembangunan Inklusif ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh pihak dan bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi yang solid.

Hal ini pun diperkuat dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada Kuartal II 2023 tetap mampu mencetak pertumbuhan positif sebesar 5,17% (*year on year/yoy*) atau 3,86% (*quarter to quarter/qtq*) sekaligus mengakumulasi pertumbuhan pada semester pertama 2023 menjadi 5,11% (*cumulative to cumulative/ctc*).

Meski begitu, Arsjad menyampaikan sinergi BUMN dan swasta saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam rangka mendorong optimalisasi potensi ekonomi bagi swasta dan BUMN, maka dibutuhkan adanya kerangka kerjasama yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) dengan berbasis prinsip-prinsip berikut:

- Prinsip *the right company at the right place*: BUMN, sebagai salah satu komponen dari negara, hadir sebagai pioneer untuk mengembangkan industri-industri yang belum berkembang, serta melayani daerah-daerah yang belum terlayani;
- Bentuk sinergi yang ditawarkan bersifat inklusif sehingga pengusaha nasional tidak hanya menjadi penonton di negara sendiri;
- Adanya insentif bagi sinergi swasta dan BUMN, termasuk dalam bentuk dukungan permodalan dari sektor perbankan (khususnya Bank-Bank BUMN)

Perlunya Penguatan Sinergi BUMN dan Swasta

Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN, Erick Thohir, memaparkan transformasi BUMN dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong kinerja BUMN yang semakin solid. Sebagaimana tercermin pada pertumbuhan Laba BUMN di tahun 2022 sebesar Rp 250 Triliun (mengeluarkan laba one-off restrukturisasi Garuda), tumbuh 100% dari Laba tahun 2021 sebesar Rp 125 Triliun.

Peningkatan ini lanjut Erick, berdampak pada peningkatan kontribusi BUMN terhadap Indonesia, tercermin dari komitmen kontribusi dividen yang telah menyentuh Rp 80,6 Triliun, kontribusi terhadap pajak sebesar Rp 278 Triliun, dan kapitalisasi pasar BUMN yang terus naik hingga Rp 2.201 Triliun pada tahun 2022.

“Selain itu, BUMN yang punya peran sebagai agen pembangunan juga mengerjakan proyek-proyek strategis nasional yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. Namun, kita tidak bisa berpuas diri, oleh karena itu untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, BUMN perlu mengoptimalkan sinergi dengan swasta termasuk UMKM, dengan memanfaatkan kekuatan dan memitigasi kelemahan masing-masing,” ujar Erick dalam sambutannya.

(lanjutan di halaman 10)



Kadin Indonesia dan BUMN Sepakat Susun Blueprint

Sebagai tindak lanjut dari forum ini, Kadin Indonesia bersama BUMN menggagas cetak biru Sinergi BUMN-Swasta, yang akan menjadi panduan bagi kerja sama yang lebih optimal dan efisien. Kadin Indonesia dan BUMN akan membentuk kelompok kerja dalam waktu dekat untuk menyusun cetak biru yang tidak hanya melihat potensi kerjasama, namun juga akan mencermati tantangan yang ada dalam relasi antara BUMN dan Swasta saat ini, agar tercipta sinergi yang inklusif, saling mengembangkan dan menguntungkan.

Cetak biru ini akan menitikberatkan pada tiga sektor yang punya potensi untuk terjadinya sinergi antara BUMN dengan swasta yang dibahas dalam Forum Sinergi BUMN-Swasta, yaitu:



- **Infrastruktur dan Logistik**, khususnya pada proyek strategis nasional seperti pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kawasan Industri Batang (KIB), Jawa Tengah.
- **Transisi Energi dan Hilirisasi Tambang**, terkait rencana hilirisasi energi baru terbarukan dan industri baterai kendaraan listrik, sebagai bagian dari transformasi ke arah energi bersih.
- **Kawasan Ekonomi Khusus Sanur**, yang memfokuskan pada kolaborasi sektor Kesehatan dan Pariwisata dalam pembangunan pusat rehabilitasi medis berskala dunia di Sanur, Bali.

Selain itu, cetak biru ini juga akan membahas aspek regulasi dan hukum yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan sinergi di ketiga sektor tersebut.

SEMINAR

Bersama Kemenko Marves, Kadin Indonesia Gelar Media Gathering Jelang Perhelatan ISF

Sebelum ISF diselenggarakan, Kadin Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan acara Media Gathering pada 22 Agustus 2023. Tujuan dari pertemuan dengan media ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pemberitaan media mengenai ISF dan isu-isu berkelanjutan yang akan dibicarakan dalam forum tersebut.



Pada media briefing tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengatakan Indonesia merupakan salah satu pusat ekonomi dunia berpotensi menjadi negara adidaya iklim. Oleh karena itu, Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan dalam hal transisi energi bersih, penyerapan karbon dan ekonomi hijau.

(lanjutan di halaman 11)

“Kepemimpinan ekonomi dan geopolitik Indonesia di kawasan, serta keberadaan sumber daya yang melimpah, mulai dari *'critical mineral'* seperti nikel dan timah, hingga luasnya hutan tropis, memposisikan Indonesia secara strategis untuk mempercepat praktik-praktik berkelanjutan dan upaya dekarbonisasi global,” kata Luhut.

Gelaran ISF merupakan bentuk komitmen Kadin Indonesia dan Kemenkomarves untuk terus berfokus dalam mendukung kolaborasi lintas negara dan kemitraan publik serta swasta dalam mencari peluang dan solusi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

RAPAT INTERNAL

Rapat Narasi Tunggal, Kadin Indonesia Dukung Optimalisasi Pengelolaan Perkebunan Indonesia

Perkebunan merupakan sub sektor pertanian yang paling strategis dan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan rata-rata kontribusi sebesar 3,51 persen selama periode 2016-2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi pengembangan industri pertanian di Indonesia masih cukup menjanjikan. Potensi tersebut karena Indonesia dianugerahi letak geografis yang strategis termasuk dilalui oleh garis khatulistiwa.

Namun demikian, beberapa sektor industri pertanian nasional sedang menghadapi tantangan lantaran isu negatif di tingkat internasional. Misalnya, resolusi sawit yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa.



Untuk itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengadakan pengkajian mengenai dampak resolusi tersebut terhadap pertumbuhan industri hilir di Indonesia. Kemenperin juga telah berpartisipasi secara lintas kementerian dalam menyiapkan narasi tunggal mengenai posisi Pemerintah Indonesia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam rangka mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan perkebunan di Indonesia, Komite Tetap (Komtap) Perkebunan Kadin Indonesia mengadakan rapat pembahasan narasi tunggal komoditas perkebunan. Rapat dilaksanakan pada 1 Agustus 2023 di Menara Kadin Indonesia. Narasi tunggal yang telah dinyatakan final adalah komoditas sawit, kopi, karet, tembakau, dan teh. Sementara itu, untuk komoditas kelapa dan gula masih dalam proses pembuatan narasi tunggal.

Sebagai tindak lanjut rapat, Komtap Perkebunan dan PISAgro berencana akan mengadakan FGD untuk menyelesaikan narasi tunggal kelapa dan gula. Narasi tunggal yang telah dinyatakan final adalah komoditas sawit, kopi, karet, tembakau, dan teh. Sementara untuk komoditas kelapa dan gula, masih dalam proses pembuatan narasi tunggal.

RAPAT INTERNAL

Fokus Bahas Devisa Hasil Ekspor (DHE), Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia Bertemu Anggota Luar Biasa (ALB)



Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan percepatan hilirisasi SDA, yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA), sebagai revisi dari PP Nomor 1 Tahun 2019.

Sebagai upaya untuk memastikan implementasi dan dampak dari PP DHE SDA, Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia mengadakan pertemuan dengan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia Bidang ESDM untuk membahas mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang berdampak pada arus kas perusahaan-perusahaan ekspor komoditas pertambangan. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 3 Agustus 2023. Pembahasan yang dilakukan telah menghasilkan beberapa tanggapan dan rekomendasi penting terkait PP tersebut dan akan difinalisasikan bersama melalui pertemuan dengan Kepala Badan dan WKU terkait pada 8 Agustus 2023.



RAPAT INTERNAL

Diskusi Lintas Bidang: Fokus Bahas Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE)

PP No.26/2023 tentang DHE, bersama dengan peraturan turunannya seperti PMK No.73/2023 dan PBI No.7/2023, berpotensi untuk memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi nasional dan bisnis. Perubahan dalam regulasi ini dapat mempengaruhi aliran dana dan proses ekspor-impor, yang memiliki implikasi turunan pada kegiatan usaha yang luas. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk segera memahami dan membahas dampak-dampak tersebut.

WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik menghadiri diskusi lintas bidang dan badan terkait kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) pada 8 Agustus 2023. Topik diskusi mencakup latar belakang, dampak dari PP No.26/2023 tentang DHE, peraturan turunannya yakni PMK No.73/2023 dan PBI No.7/2023, serta perumusan posisi advokasi Kadin Indonesia. Sebagai langkah selanjutnya, seluruh pengurus terkait sedang memfinalisasikan surat permohonan peninjauan kembali yang akan dikirimkan kepada Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur BI serta Ketua.



RAPAT INTERNAL

Rapimprov dan Pengukuhan Pengurus Kadin Provinsi

Rapimprov dan Pengukuhan Pengurus Kadin Kalimantan Timur

Hadirnya Kadin di setiap Provinsi memegang peranan penting dalam mengarahkan perekonomian daerah maupun nasional. Oleh karena itu, Kadin Indonesia berkomitmen untuk membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan inovatif di seluruh provinsi. Salah satu realisasi dari komitmen ini terwujud di Kalimantan Timur (KalTim).

Pada 15 Agustus 2023 di hotel Novotel Balikpapan, WKU Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Bapak Yukki Nugrahawan Hanafi, membuka secara resmi Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin KalTim yang mengambil tema “Kadin Kuat, Ekonomi Daerah Kuat, Kaltim Berdaulat”. Rapimprov dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari Pengurus Kadin KalTim dan 10 Ketua Kadin Kabupaten/ Kota di KalTim serta tamu undangan. Kadin Indonesia mengajak Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mensinergikan 104 program kerja yang terkait Kadin di daerah dengan program kerja.



Keesokan harinya, pada 16 Agustus 2023, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Kadin Provinsi KalTim untuk masa bakti 2022-2027. Acara pengukuhan ini merupakan bagian dari rangkaian Rapimprov Kadin KalTim dan dimulai dengan pembukaan oleh Gubernur KalTim, Isran Noor, yang dihadiri oleh 300 peserta.

Peserta terdiri dari berbagai tokoh penting seperti Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda KalTim Irjen Pol Imam Sugianto, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, serta para Ketua Umum Kadin Provinsi se-Indonesia, dan Ketua Kadin Kabupaten dan Kota se-KalTim. Pengukuhan ini menjadi momen bersejarah karena menjadi pertemuan perdana seluruh Ketua Umum Kadin di KalTim, yang juga merupakan Ibu Kota Negara Nusantara.

(Lanjutan di halaman 14)

Rapimprov Kadin Kalimantan Selatan

Kadin Indonesia terus berkomitmen untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antara para pemimpin dan anggota di tingkat provinsi guna menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Komitmen ini diwujudkan dalam Rapimprov yang diselenggarakan oleh Kadin Kalimantan Selatan (KalSel) pada 8 Agustus 2023 di Banjarmasin.

Dalam acara tersebut, sinergi program daerah juga diwakili bersama narasumber WKU Bidang Vokasi dan Sertifikasi serta Komtap Bidang Pertanian. Rapimprov ini diawali dengan pembukaan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sulkan, S.H., M.M., dan dihadiri oleh sekitar 200 partisipan.



RAPAT INTERNAL

Rakernas Bidang Organisasi Siap Dorong Sinergitas antar Anggota



Sebagai organisasi yang mewadahi para pelaku usaha di Indonesia, Kadin Indonesia berkomitmen untuk memiliki kepengurusan yang sinergis dan tangguh agar mampu membantu para anggotanya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen tersebut, Kadin Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang Organisasi yang diselenggarakan pada 15-16 Agustus 2023 dengan mengusung tema besar "Satu Kadin, Pengusaha Bangkit, Indonesia Maju 2045". Rakernas Bidang Organisasi dibuka oleh WKU Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi, Yukki Nugrahawan, dan WKU Organisasi, Eka Sastra.

Diharapkan Rakernas Organisasi dapat mempererat sinergis program kerja Kadin Indonesia dengan keorganisasian di setiap provinsi sehingga dapat mendorong anggotanya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.



KUNJUNGAN DELEGASI INTERNASIONAL

Kadin Indonesia Ajak UMKM Tembus Pasar Jepang Melalui Business Matching

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang berperan dalam struktur perekonomian Indonesia. Saat ini terdapat kurang lebih 64 juta pelaku UMKM dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61% atau senilai Rp 8.5 triliun. Namun, tidak bisa dipungkiri masih terdapat tantangan tersendiri bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka, seperti minimnya akses ke pasar, permodalan yang terbatas, dan kurangnya pengetahuan tentang manajemen bisnis.



Melihat adanya kebutuhan ini, Kadin Indonesia terus berkomitmen mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing demi terwujudnya UMKM 'naik kelas'. Kali ini, melalui program WikiExport Jepang (WikiExport.JP), Kadin Indonesia menggelar *business matching* di Tokyo untuk mendorong UMKM Indonesia untuk menembus pasar ekspor Jepang. *Business matching* ini merupakan kolaborasi Kadin Indonesia dengan Japanese Trade Organization (Jetro), dan program pemberdayaan UMKM binaan PT HM Sampoerna Tbk., Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC).

(Lanjutan di halaman 16)



WKU Kewirausahaan Kadin Indonesia, Aldi Haryoprato, mengatakan, tantangan yang saat ini dihadapi bagi pengembangan UMKM adalah akses terhadap pasar yang masih terbatas. Oleh karena itu, WikiExport Jepang hadir untuk menjembatani UMKM dengan para pelaku usaha dan pembeli yang berlokasi di Jepang. Gelaran *business matching* ini dilaksanakan di Tokyo dari 8-11 Agustus 2023 sekaligus sebagai upaya mendorong UMKM Indonesia menjadi pemasok bagi perusahaan Jepang.

Hingga saat ini, terdapat lebih dari 200 UMKM yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan ekspor melalui platform WikiExport.JP. Setelah melalui proses kurasi, terdapat sembilan UMKM Indonesia yang siap memasuki pasar ekspor Jepang, dengan harapan terjadi transaksi dan persetujuan kontrak kerjasama.

UMKM terpilih diminta untuk mempresentasikan bisnis mereka dan membawa contoh produk-produk unggulan yang ditawarkan. Setelah itu, mereka diberi kesempatan berdiskusi dengan calon pembeli untuk membahas secara detail proses transaksi lebih lanjut.

Kesembilan UMKM tersebut antara lain Pipiltin Cocoa, Alko Sumatra Kopi, Sukkha Citta, Shiroshima, House of Tea, Balista Coffee Liqueur, Sambal Pecah, Jamune, dan Ohana Mie.

Pasca *business matching* berlangsung, para UMKM terpilih juga diberikan pelatihan dan lokakarya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai ekspor. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Tetap UMKM Export Kadin Indonesia, Nita Kartikasari, optimis *business matching* ini dapat menjadi langkah awal yang baik untuk memperkuat ekspor Indonesia-Jepang.

KUNJUNGAN DELEGASI INTERNASIONAL

Dalam Rangka ASEAN-BAC 2023, EU-ASEAN Business Council Kunjungi Kadin Indonesia

Inovasi dan inklusivitas menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di kawasan ASEAN. Demi memperkuat posisi ASEAN di mata dunia sebagai kawasan yang menarik untuk berinvestasi, ASEAN Business Advisory Council (BAC) 2023 hadir dengan mengusung tema "ASEAN Centrality: Innovating Towards Greater Inclusivity."



(lanjutan di halaman 17)

Kekuatan esensial kawasan ASEAN terletak pada hubungan komplementer di antara negara-negara anggota. Kolaborasi yang inklusif dan harmonis ini menjadi dasar kemajuan, memungkinkan kawasan ini berdiri kokoh menghadapi tekanan pasar eksternal. Pertumbuhan ekonomi ASEAN juga tercatat melejit hingga 5,7% pada tahun 2022. Dengan *outlook* positif pada pemulihan sektor jasa, diperkirakan laju pertumbuhan akan mencapai 4,6% pada 2023 dan 4,9% pada 2024.

Selain itu, perdagangan barang total juga mencatat pertumbuhan yang kuat, sebesar 14,9%, atau mencapai total nilai US\$3.847,0 miliar. Sedangkan perdagangan intra-ASEAN melonjak 21,3% pada tahun 2022, berkontribusi 22,3% dari total perdagangan ASEAN. Pada perhelatan kali ini, ASEAN-BAC sangat fokus pada sentralitas, inovasi, dan inklusivitas, yang bersumber dari nilai-nilai fundamental 5P, yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership*.



Dalam rangka ASEAN Business Advisory Council (BAC) 2023, Kadin Indonesia menerima kunjungan dari EU-ASEAN Business Council pada 2 Agustus 2023. Diwakili oleh WKU Bidang Hubungan Internasional, Bernardino M. Vega dan perwakilan Komite Tetap Eropa, Catharina Widjaja di Menara Kadin Indonesia, pertemuan ini turut menyinggung lima prioritas utama program, yaitu *digital transformation sustainable development, health resilience, food security, dan trade and investment facilitation*.



Pembahasan lima isu prioritas kemudian dikembangkan menjadi delapan proyek warisan, yaitu ASEAN QR Code, Marketplace Lending Program, Wiki Entrepreneur, ASEAN Net Zero, Carbon Center of Excellence, ASEAN One Shot Campaign, Inclusive Closed Loop Model for Agricultural Product, dan ASEAN Business Entity. Kedelapan proyek warisan ini merupakan upaya nyata dan praktik konkret untuk mewujudkan lima prioritas program di atas. Pertemuan EU-ASEAN Business Council dan Kadin Indonesia ini diharapkan juga dapat mendorong reformasi kebijakan dan menempatkan ASEAN sebagai pusat ekonomi global.

Merupakan sebuah tujuan bersama bahwa delapan *legacy project* ini akan berdampak signifikan bagi terciptanya era baru berbisnis di kawasan ASEAN. Hal ini juga akan menjadi salah satu topik pembahasan antara pelaku usaha dan para kepala pemerintahan. Dengan terciptanya kolaborasi dan hubungan yang baik, ASEAN dapat memperkuat daya saing dan menjadikan dirinya sebagai pemain berpengaruh di panggung global.



Kadin Indonesia Terima Lawatan Delegasi Taiwan

Taiwan telah menjadi mitra strategis dalam bidang perdagangan dengan Indonesia. Menurut data dari Taipei Economic and Trade Office, kerjasama Indonesia dengan Taiwan telah terjalin sejak 1967 hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua pihak pun terbilang erat dan sukses. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat Indonesia memiliki surplus perdagangan dengan Taiwan sebesar US\$6,32 miliar pada tahun 2022 dimana aktivitas ekspor Indonesia ke Taiwan didominasi oleh produk-produk manufaktur, seperti produk elektronik, mesin, dan produk kimia. Sementara itu, impor Indonesia dari Taiwan didominasi oleh produk-produk elektronik, bahan kimia, dan bahan baku.

Terjalannya kolaborasi antar kedua pihak ini pun terus terjalin yang tergambar dari telah dilakukannya penandatanganan beberapa perjanjian perdagangan bilateral, termasuk Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Taiwan (Indonesia-Taiwan Free Trade Agreement, ITFFTA) yang mulai berlaku sejak tahun 2020.

Lebih lanjut, terkait rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menurut keterangan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, pengembangan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia dan secara khusus proyek pembangunan IKN sangat disambut baik calon investor dari Taiwan. Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) pun juga sudah membuka peluang bagi para perusahaan-perusahaan internasional, termasuk Taiwan.

Hal ini sejalan dengan strategi Kadin Indonesia dengan pemerintah untuk mendorong lebih banyak investasi di IKN. Kadin Indonesia dan pemerintah terus berupaya meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di IKN melalui berbagai insentif yang diberikan baik dari sisi fiskal maupun perizinan.

Jeli melihat potensi yang ada, Kadin Indonesia, Komite Tetap Asia Pasifik, dan Pokja IKN menerima kunjungan dari delegasi Taiwan pada 2 Agustus 2023. WKU Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani menjadi perwakilan Kadin Indonesia yang menerima kunjungan ini.

Melalui dilaksanakannya kunjungan ini diharapkan dapat terbangun peluang kerjasama yang lebih menguntungkan antara Indonesia dan Taiwan, penguatan hubungan bilateral kedua negara, dan realisasi investasi di IKN.

KUNJUNGAN DELEGASI INTERNASIONAL



Kadin Indonesia Bangun Dialog Konstruktif dengan Farook Institute

Kemitraan antar negara dalam perdagangan merupakan pintu gerbang untuk terbukanya peluang bisnis yang lebih menguntungkan bagi banyak pihak. Indonesia dan India adalah sahabat lama dan mitra strategis di kawasan dan global. Menurut data dari Kementerian Perdagangan RI, India merupakan mitra strategis Indonesia sekaligus negara tujuan ekspor terbesar ke-4 dan ke-21 sumber investasi asing terbesar. Selain itu, saat ini, kedua negara telah memiliki ASEAN-India Free Trade Agreement (FTA) sebagai perjanjian dagang regional.

(lanjutan di halaman 19)

Kawasan Asia Selatan, khususnya India, telah menjadi pasar potensial yang perlu digarap secara intensif. Oleh karena itu, penting untuk membangun dialog yang interaktif dan hubungan yang baik demi masuknya produk-produk unggulan Indonesia ke pasar India. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, pada tahun 2022, total perdagangan Indonesia dan India tercatat 32,71 miliar dolar AS atau naik 55,68 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat 21,01 miliar dolar AS. Komoditas ekspor utama Indonesia ke India meliputi batu bara, minyak sawit dan turunannya, besi paduan, asam lemak mono karboksilat industri, serta bijih tembaga dan konsentratnya. Sementara itu, komoditas impor utama Indonesia dari India didominasi oleh produk besi setengah jadi, gula tebu, kacang tanah, daging sapi beku, dan besi paduan.

Sebagai upaya untuk memperlancar hubungan perdagangan sekaligus mengeksplor potensi kolaborasi yang bisa dijajaki, Kadin Indonesia menerima kunjungan dari Farook Institute of Management Studies Calicut, India. Pertemuan yang diadakan pada 10 Agustus 2023 ini diwakili oleh Ketua Komite Tetap Asia Pasifik Kadin Indonesia, Yohanes Lukiman.



Bersama Farook Institute, Kadin Indonesia berdialog secara konstruktif untuk bisa dengan jelas melihat celah yang dapat dikembangkan untuk memajukan kedua negara dalam sektor bisnis sembari memelihara stabilitas hubungan antara Indonesia dan India. Ketua Komite Tetap Asia Pasifik Kadin Indonesia, Yohanes Lukiman, menekankan pentingnya kolaborasi inklusif dengan India sebagai media pertukaran wawasan yang dapat menjajaki potensi kerjasama jangka panjang.





PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

Kadin Siap Dukung Program Riset dan Inovasi bersama BRIN

Menurut Statistik Telekomunikasi Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212 juta, atau sekitar 77% dari total populasi. Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat ke-5 di dunia dalam hal jumlah pengguna internet.

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Keuangan RI, pemerintah telah berkomitmen untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dengan menjadi kekuatan 12 besar dunia tahun 2025 dan delapan besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada saat itu, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia diharapkan akan mencapai USD 4,5 triliun dengan Pendapatan per kapita penduduknya mencapai USD 15.500.

Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-28 menjadi momentum untuk mendorong pengembangan riset dan inovasi dalam rangka peningkatan daya saing bangsa dan pendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.



Sebagai wujud dukungan terhadap target ambisius tersebut, Kadin Indonesia mengambil langkah dengan melakukan penandatanganan MoU dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait sinergitas penyelenggaraan program riset dan inovasi, serta diversifikasi guna meningkatkan daya saing industri nasional dan program bidang prioritas pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dan Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko pada 10 Agustus 2023.

Di momen yang sama, turut dilaksanakan pula penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Britek Kadin Indonesia dengan Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN dengan ruang lingkup meliputi tata kelola sistem lembaga riset dan fasilitasi manajemen riset dan inovasi. Penandatanganan yang berlangsung di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Sekretaris Badan Riset dan Teknologi Kadin Indonesia, Lilly S Wasitova, Deputi Bidang Fasilitasi Riset, dan Inovasi BRIN, Agus Haryono.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

Pentingnya Mencetak Pengusaha Kreatif di Sektor Lingkungan Hidup, Bidang LHK Kadin Sepakati Kerjasama dengan BRIN



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Bidang Pengembangan Pembinaan Wirausaha Kreatif LHK memiliki peranan dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan wirausaha kreatif di bidang lingkungan. Melansir data dari Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK, saat ini, pembinaan wirausaha kreatif di bidang lingkungan dilakukan melalui beberapa skema, seperti pendampingan, pengembangan wawasan terkait ekonomi sirkular, hingga dukungan terhadap fasilitas usaha UMKM.

Pembinaan wirausaha kreatif di bidang lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks keberlanjutan global. Secara jangka panjang, terbentuknya wirausahawan kreatif yang sadar akan isu *sustainability* akan menjadi katalisator inovasi yang menghasilkan solusi kebaruan untuk tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Wirausaha kreatif dalam bidang lingkungan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat.

Sebagai mitra pemerintah, Kadin Indonesia senantiasa mendukung terciptanya lebih banyak pengusaha kreatif di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Komitmen ini terwujud melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kadin Indonesia dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ruang lingkup kerjasama ini mencakup penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi guna mendukung pengusaha kreatif di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh WKU Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Silverius Oscar dan Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan (ORHL) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Iman Hidayat. Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat menunjang penelitian untuk menghasilkan peningkatan inovasi, pengembangan teknologi baru, hingga kemunculan solusi berkelanjutan yang dapat mendukung praktik pengusaha kreatif di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

Kadin Indonesia dan PANDI Jalin Kerjasama Dukung Domain.id Sebagai Identitas Digital Indonesia

Ekonomi digital di Indonesia terus menunjukkan potensi yang besar. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mencatat nilai transaksi niaga elektronik (*e-commerce*) di Indonesia telah mencapai Rp476,3 triliun dan hingga tahun lalu terdapat 20.997.131 UMKM yang telah terdigitalisasi.

Digitalisasi menjadi proses transformasi yang vital bagi UMKM untuk dapat bersaing di pasar global dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam perwujudannya, digitalisasi UMKM membutuhkan sinergi yang solid dari semua seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait.

Melihat adanya urgensi ini, Kadin Indonesia secara resmi menggandeng Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) dalam upaya mempercepat proses digitalisasi UMKM di Indonesia. Kerjasama tersebut secara resmi dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan di Balikpapan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, dan Ketua PANDI, John Sihar Simanjuntak pada 16 Agustus 2023.

Tidak hanya sebuah alamat online, Domain .id merupakan representasi nyata dari identitas Indonesia dalam dunia maya. WKU Bidang Komunikasi dan Informasi, Firlie Ganinduto, menyampaikan bahwa kerjasama antara Kadin Indonesia dan PANDI dalam mendukung domain.id sebagai identitas digital Indonesia merupakan langkah penting dalam mempercepat proses digitalisasi UMKM di Indonesia.

UMKM akan memiliki akses yang lebih mudah, kredibel dan terjangkau ke pasar digital, khususnya melalui *website*. Langkah ini akan memungkinkan UMKM lebih dikenal dan mudah diakses oleh konsumen lokal maupun internasional demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.





Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid Ajak Seluruh Anggota Kadin Menggunakan Domain.id



Kadin Indonesia siap untuk mendukung Domain .id agar wajib digunakan oleh seluruh anggota Kadin Indonesia. Secara khusus, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengajak seluruh anggota Kadin Indonesia untuk menggunakan Domain .id sebagai identitas digitalnya dalam upaya mendorong kemajuan identitas digital Indonesia.

Selain itu, Ketua PANDI, John Sihar Simanjuntak, menjelaskan bahwa kerja sama ini nantinya juga akan meliputi seperti sosialisasi, pelatihan atau seminar dalam pemanfaatan nama Domain.id. John juga berharap penggunaan Domain.id sebagai identitas digital Indonesia ini mampu mendukung kedaulatan internet Indonesia.

*Penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga dilakukan di lingkungan IKN dan berdekatan dengan peringatan HUT ke-78 RI sebagai **simbol komitmen** penggunaan Domain.id dalam mendukung Kedaulatan Internet Indonesia dan juga Kedaulatan bangsa Indonesia, terang John.*

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini turut disaksikan dan dihadiri oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono, Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., seluruh pejabat Kadin Indonesia dan juga seluruh pejabat PANDI yang hadir. Seremoni penandatanganan Nota Kesepahaman ini kemudian ditutup dengan foto bersama antara Kadin Indonesia dan PANDI.



Kadin Balikpapan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nelayan Lewat Digitalisasi Sistem Lelang Inklusif

Rendahnya kesadaran nelayan akan masalah nilai tukar, panjangnya rantai pasok perikanan, dan minimnya penerapan teknologi digital telah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Kadin Indonesia melalui ajang Kadin Impact Award (KIA) terus mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah. Ajang apresiasi yang mengusung tema “Satu Kadin Membangun Bangsa” ini kembali melanjutkan proses penjurian yang kali ini berkesempatan untuk mengunjungi Kadin Balikpapan, yang menghadirkan program Bidfish.id

Platform Bidfish.id merupakan inovasi pendampingan yang dirancang khusus bagi nelayan untuk membuka akses menuju pasar yang lebih luas dan memungkinkan nelayan terhubung dengan konsumen secara langsung melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam jangka panjang, dengan akses pasar yang lebih luas dan harga jual produk yang lebih baik melalui sistem lelang ikan *online*, bidfish.id diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memotong rantai pasok ikan menjadi lebih singkat, juga mempercepat proses jual-beli ikan melalui penerapan teknologi digital.



(lanjutan di halaman 25)

Ketua Umum Kadin Indonesia mengapresiasi program Kadin Balikpapan yang bisa membawa dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan nelayan



Program Kadin Balikpapan ini termasuk program yang mampu membawa dampak positif melalui pembinaan bagi para nelayan. Bidfish.id bukan sekadar program lelang ikan, melainkan solusi inovatif yang mempersembahkan keberlanjutan dan kesejahteraan bagi nelayan, masyarakat pesisir, dan sumber daya laut yang berlimpah, tutur Arsjad.

Pada proses penilaian yang dilaksanakan pada 16 Agustus 2023 ini, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informasi, Firlie Ganinduto, menegaskan digitalisasi yang diperkenalkan melalui Bidfish adalah bukti konkret peran sektor swasta dalam mendukung UMKM dan ekonomi lokal.

Tidak hanya mengangkat pendapatan nelayan hingga 20% dan kesejahteraan masyarakat pesisir di 23 daerah di Kalimantan Timur, program ini juga menjanjikan kualitas dan kuantitas produk perikanan yang meningkat hingga 280 Ton ikan yang siap dilelang secara online.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kadin Balikpapan, Yaser Arafat, menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan nelayan di Balikpapan ini terbentuk melalui kolaborasi inklusif yang melibatkan nelayan dalam pemanfaatan platform. Hal ini menggambarkan komitmen Kadin Indonesia dalam merangsang pertumbuhan inklusif melalui kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, dan nelayan. Tidak hanya bertujuan untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi, Kadin Indonesia juga menjadi pelopor dalam menghubungkan berbagai elemen demi kesejahteraan bersama.

Kunjungan ke Bidfish.id ini merupakan kunjungan KIA yang ke-9. Sebelumnya, kunjungan program KIA sudah dilaksanakan di beberapa daerah, seperti Provinsi Jawa Timur, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Aceh, dan Provinsi Bali. Diharapkan pengumuman KIA akan dilakukan pada Rapimnas Kadin 2023 pada Desember mendatang

ENGAGEMENT KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Pengurus Bidang Asosiasi dan Himpunan Adakan Diskusi Kebijakan Neraca Komoditas

Pemerintah terus melakukan penyederhanaan, percepatan, dan transparansi perizinan serta kemudahan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Kualitas pelayanan yang terintegrasi dan transparan menjadi syarat wajib untuk menciptakan kondisi tersebut, terutama dalam pengelolaan ekspor impor.

Neraca komoditas memegang peranan utama yaitu terlaksananya pemberian perizinan ekspor dan impor yang transparan dan berdasarkan data yang akurat serta dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Selain itu, dari perspektif pengembangan industri, keberadaan neraca komoditas akan menyediakan data yang lengkap, detail, dan akurat mengenai kebutuhan dan pasokan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk industri dalam negeri.

Secara khusus, menurut Kementerian Perindustrian, neraca komoditas besi dan baja diperlukan untuk menjaga iklim usaha industri baja nasional yang kondusif. Dari sisi lain, perkembangan industri logam dan baja di Tanah Air terus meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca-pandemi Covid-19.

Menurut data dari Kementerian Perindustrian, terjadi kenaikan impor pada bahan baku industri logam, besi, dan baja. Hal ini berimbas pada penerapan kebijakan neraca komoditas yang menyebabkan gangguan pada proses produksi. Sadar akan pentingnya isu ini, Kadin Indonesia berinisiatif untuk pertemuan dengan 10 Anggota Luar Biasa (ALB) yang merupakan asosiasi sektoral dari industri logam, besi, baja serta produk turunannya.

Pertemuan ini fokus membahas isu-isu seputar neraca komoditas logam, besi, baja untuk merumuskan usulan strategi yang efektif terkait kebijakan ini. Selain itu, turut dibahas hal-hal yang nantinya akan digunakan sebagai bahan advokasi, dan diskusi advokasi kebijakan neraca komoditas selanjutnya akan dilakukan tanggal 22 Agustus 2023 secara luring.



ENGAGEMENT KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Dukung Program Pemerintah, Kadin Indonesia Kirim Mahasiswa Magang ke Industri Transportasi Ceko

Pemerintah melihat pentingnya menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang siap menghadapi perubahan sosial, budaya, hingga tantangan di dunia kerja seiring pesatnya kemajuan teknologi. Untuk dapat bersaing di dunia yang semakin kompetitif, antara lulusan perguruan tinggi dan dunia kerja menjadi hal yang diperlukan. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

(lanjutan di halaman 27)



Untuk menjawab kebutuhan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Kebijakan ini memiliki program yang memungkinkan mahasiswa memiliki satu semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan dua semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Beberapa bentuk dari kegiatan belajar di luar perguruan tinggi ini dapat berupa melakukan penelitian, kegiatan wirausaha, hingga melakukan praktik magang di industri atau tempat kerja selama masa studi berlangsung.

Kadin Indonesia senantiasa menunjukkan dukungan terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang merupakan perwujudan skema pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Dukungan ini terlihat dari pelepasan 20 mahasiswa untuk menjalani praktik kerja di Ceko pada 9 Agustus 2023.

Mahasiswa yang terpilih dari berbagai politeknik di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi ini akan menjalani program magang di Perusahaan Skoda Transportation, Ceko. Beberapa posisi teknis telah siap untuk diisi oleh para peserta magang, seperti pekerja las, elektromekanik, dan mekanik.

Dalam upaya menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, keikutsertaan mahasiswa dalam program magang ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara dunia pendidikan vokasi dan industri, sehingga dapat menciptakan lulusan yang lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja yang semakin kompetitif.



ENGAGEMENT KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Perluas Kontribusi Pelaku Usaha dalam Mitigasi Bencana

Penanggulangan bencana merupakan sebuah upaya yang memerlukan keterlibatan kolektif dalam pelaksanaannya. Demi terwujudnya ketangguhan bencana saat ini diperlukan pendekatan multisektoral. Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memasukkan lembaga usaha sebagai salah satu unsur dalam pentahelix penanggulangan bencana. Keterlibatan lembaga usaha ini telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Perka BNPB No. 12/2014).

Kontribusi pelaku usaha untuk mengatasi bencana tidak hanya mengacu pada kontribusi finansial melalui donasi semata. Lebih dari itu, lembaga usaha dan pelaku bisnis diharapkan dapat ikut mengambil andil dalam menyumbangkan sumber daya yang dimiliki dan mengintegrasikan gagasan kebencanaan ke dalam struktur dan operasi bisnis mereka. Hal ini mencakup perencanaan untuk menghadapi situasi darurat, pelatihan karyawan dalam hal tanggap darurat, serta membangun infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana, seperti gedung yang kuat dan terstruktur dengan baik.



Keterlibatan pelaku UMKM juga diperlukan dalam hal ini. BNPB dalam keterangannya berharap perusahaan swasta maupun NGO dapat menjadikan UMKM sebagai mitra binaan dalam meningkatkan ketangguhan ekonomi dengan menyelaraskan konsep pengembangan bisnis dengan tetap menggandeng pengurangan risiko bencana.

(lanjutan di halaman 29)

Sebagai langkah konkret dalam mendidik dan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi dampak bencana, Kadin Indonesia bersama USAID - Bureau for Humanitarian Assistance (BHA), World Vision, Inc. (WV), Catholic Relief Services (CRS), dan Miyamoto Internasional melangsungkan Lokakarya Program Komunitas Urban Untuk Aksi Tangguh (KUAT). Lokakarya yang dilaksanakan pada 9 Agustus 2023 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku UMKM tentang pentingnya persiapan dan reaksi yang tepat dalam menghadapi bencana dan membuka dialog antara sektor bisnis, pemerintah, dan organisasi bantuan dalam menciptakan rencana mitigasi bencana yang kokoh.

Lokakarya ini dihadiri langsung oleh WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Suryani Motik, WKU Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi, Carmelita Hartoto, WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Direktur Mitigasi, Kedeputusan Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Berton Suar Pelita Panjaitan, dan Direktur Program USAID KUAT, Jeff Cohen. Selepas terlaksananya lokakarya ini, harapannya para pelaku usaha, khususnya UMKM dapat memahami peranan mereka dalam mitigasi bencana dan bagaimana mereka dapat mempersiapkan bisnis mereka secara lebih baik untuk menghadapi ancaman bencana di masa depan.

ENGAGEMENT KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Owners Lunch Meeting Kadin Indonesia, Fokus Bahas Peluang Multi Usaha Kehutanan

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan kawasan hutan produksi yang ditetapkan sejak 2021, yaitu pendekatan Multi Usaha Kehutanan (MUK). Pendekatan ini merupakan penerapan praktik usaha kehutanan yang mencakup pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dengan tujuan mengoptimalkan kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi.

Ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan kawasan hutan produksi dan meningkatkan nilai dari kayu yang diproduksi.



Bagi para pemilik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), regulasi ini menjadi peluang besar karena adanya potensi pendapatan lain di samping pemanfaatan kayu tanpa perlu mengurus perizinan baru. Terlebih lagi, pemerintah saat ini kian ketat dalam mengambil tindakan tegas atas PBPH yang tidak aktif atau tidak memanfaatkan lahan dengan baik.

(lanjutan di halaman 29)



Lebih lanjut, penerapan prinsip *sustainability* dan *regenerative* saat ini kian sejalan dengan tren global seiring dengan meningkatnya demand terhadap produksi berkelanjutan. Hal ini dapat menjadi potensi bagi pengelolaan hutan dengan konsep MUK dan *regenerative forestry* demi meningkatkan daya saing dari produk yang dihasilkan untuk memenuhi permintaan dari para *offtakers*.

Dalam upaya mendukung penerapan pendekatan yang secara resmi ditetapkan pada tahun 2021 ini, Kadin Indonesia melakukan pertemuan dengan pemilik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam Owners Lunch Meeting pada 10 Agustus 2023 yang mempertemukan Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, WKU Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Silverius Oscar Unggul dengan 25 pemilik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Pertemuan ini fokus membahas terkait peluang pengelolaan PBPH dengan skema multi usaha kehutanan dan menjadi forum untuk mendiskusikan tantangan pada penerapan skema ini. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menekankan pentingnya memanfaatkan lahan hutan dengan baik untuk memperoleh nilai tambah optimum sekaligus menghindari tindakan penertiban perizinan



ENGAGEMENT KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Siap Bantu Peningkatan Jumlah Kendaraan Listrik, Pokja Sustainability Gelar Pertemuan dengan Kemenko Marves



Membangun ekosistem kendaraan listrik tidak dapat dilakukan secara instan. Sosialisasi dan edukasi terkait teknologi, kualitas, dan usaha pengurangan emisi karbon perlu terus digencarkan. Dalam misi mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan listrik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai perluasan penerima program bantuan untuk pembelian motor listrik roda dua berbasis baterai. Kebijakan ini ditandai dengan penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin nomor 6 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Melalui program bantuan pemerintah ini, masyarakat akan mendapat potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit kendaraan bermotor listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Dua. Pada Permenperin 21/2023 ini disebutkan bahwa program bantuan diberikan untuk satu kali pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang dilakukan oleh masyarakat dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama.

Di sisi lain, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia mencatat jumlah penjualan motor listrik di Indonesia hingga pertengahan tahun 2023 baru menyentuh angka 59.000 unit, dimana jumlah ini masih lebih kecil dibandingkan dengan populasi motor konvensional yang berjumlah 125 juta unit.

Kadin Indonesia sadar akan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam memenuhi target nasional, Pokja Sustainability dan Bidang Perindustrian Kadin Indonesia menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh WKU Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani pada 10 Agustus bertempat di kantor Kemenko Marves. Dalam pertemuan ini, turut dibahas langkah-langkah yang akan diambil dalam mendorong pemanfaatan kebijakan subsidi bagi motor listrik sebagai upaya menciptakan transportasi berkelanjutan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan akan mendorong peningkatan penjualan motor listrik dan mengarah ke pencapaian target nasional sebanyak 200 ribu unit

LIPUTAN KHUSUS

Dukung Visi Indonesia Emas 2045, Kadin Indonesia Langsungkan Upacara HUT Ke-78 RI di IKN

Indonesia memiliki cita-cita bersama yang terangkum dalam Visi Indonesia Emas 2045, dimana Indonesia diproyeksikan menjadi negara maju dan sejahtera dengan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada usia yang ke-100 sejak kemerdekaannya.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki negara lain. Keunggulan ini meliputi pasar domestik yang besar, potensi tenaga kerja produktif, dan memiliki populasi melek digital yang tinggi.

Selain itu, Indonesia diprediksi akan menikmati bonus demografi pada 2030 ketika jumlah penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 68,3% dari total populasi. Indonesia juga akan diuntungkan dengan sumber daya alam dan biodiversitas yang melimpah, termasuk cadangan nikel yang terbesar di dunia yakni sebanyak 21 juta ton dan sumber daya energi baru terbarukan (EBT) hingga 3.600 gigawatt. Potensi ini yang dapat membantu Indonesia lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*) dan menjadi negara maju.



Oleh karena itu, Indonesia harus mengoptimalkan segala peluang dan potensi yang ada, ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid



Dalam momen mendukung visi tersebut, pada 17 Agustus 2023, Kadin Indonesia melangsungkan upacara perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama dengan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN).

IKN adalah simbol tentang Indonesia yang maju dan modern 20 tahun dari sekarang

Pelaksanaan upacara perayaan HUT ke-78 RI bersama Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono ini merupakan bentuk nyata komitmen Kadin Indonesia akan masa depan Indonesia yang sejahtera dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Kadin Indonesia menyadari, diperlukan semangat gotong royong dan identitas Bhinneka Tunggal Ika dalam pembangunan ekonomi dengan baik. Untuk itu, Kadin Indonesia mengajak masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan



Kami percaya bahwa, IKN dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, keberlanjutan dan berbasis teknologi. Dengan integrasi infrastruktur modern, energi baru terbarukan serta teknologi digital, IKN dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, ujar Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono.



MANFAAT

Keanggotaan **Kadin**

Nikmati ragam keuntungan dan manfaat dengan menjadi bagian dari **keanggotaan Kadin Indonesia**



Update terhadap
Perkembangan Ekonomi
dan **Bisnis**



Net Zero



Dukungan **Advokasi**



Kemudahan **Pembuatan**
Surat Keterangan



Scaling up skill/
Kemampuan Wirausaha
dan Pekerja



Akses terhadap **Market**



Tumbuhkan Bisnis melalui
Network dan **Kolaborasi**



Akses terhadap
Transformasi Digital



Kesempatan **Promosi**



Dukungan dalam
Penerapan TKDN



Terlibat dalam
Penyusunan Kebijakan
Industrial



Potongan Harga

CARA PENDAFTARAN

Anggota Kadin



Scan QR Code atau
kunjungi **anggota.kadin.id**

1



Klik **"Daftar Anggota"**, lalu pilih jenis keanggotaan

2



Membuat akun dengan mendaftarkan **email** dan **NIK**

3



Menerima notifikasi pendaftaran akun dari **info.anggota@kadin.id**

4



Masuk dengan akun yang didaftarkan

5



Lengkapi formulir dengan data yang diperlukan

Persyaratan yang dibutuhkan:

- ✓ Email Penanggung Jawab
- ✓ NIB Perusahaan
- ✓ AKTA Perusahaan
- ✓ NPWP Perusahaan
- ✓ KTP Direksi
- ✓ Foto Pass Direksi
- ✓ No HP Penanggung Jawab

6



Menerima notifikasi dan unduh invoice pembayaran

7



Melakukan pembayaran ke rekening/ virtual account yang tertera di invoice

8



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**

9



Download **KTA-B**, Anda telah resmi menjadi anggota Kadin

CARA MEMPERPANJANG KEANGGOTAAN KADIN

Hotline Keanggotaan
0813 8862 8081 | 0813 9830 2790



Kunjungi **anggota.kadin.id**



Masukan Email dan kata sandi, lalu klik **"Masuk"**



Klik menu **"KTA"**, lalu klik menu **"Perpanjang KTA"**



Menerima notifikasi perpanjangan keanggotaan dan invoice dari **info.anggota@kadin.id**



Melakukan pembayaran ke rekening/virtual account yang tertera di invoice



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**



Download **KTA-B**, Anda telah memperpanjang keanggotaan Kadin

FITUR TERBARU

Website **Kadin.id**



Forum Anggota Kadin

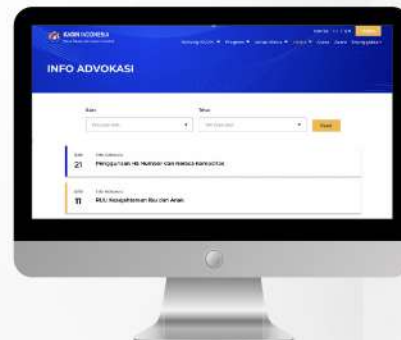
Dibuat sebagai tempat **berbagi informasi** seputar bisnis, *networking*, dan diskusi interaktif seputar perkembangan dunia usaha. Forum Anggota Kadin dikelola oleh Sekretariat Kadin Indonesia sebagai administrator.

Layanan Kadin



Halaman-halaman yang menonjolkan **layanan sekretariat** dan **manfaat keanggotaan**

Info Advokasi Kadin



Tempat untuk menghimpun informasi mengenai **perkembangan advokasi terkini** yang dilakukan oleh Kadin

BERITA TERKINI | SUMBER: HUKUMONLINE.COM

UU Kesehatan Resmi Terbit, 11 UU Ini Dinyatakan Tak Berlaku

Pasca Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna DPR bulan lalu, tapi tak ada draf resmi yang diterbitkan ke publik. DPR seolah enggan meluncurkan draf RUU Kesehatan yang resmi disetujui menjadi UU ke publik. Tapi akhirnya selang sebulan, pemerintah melalui Sekretariat Negara (Setneg) resmi meluncurkan UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pasca resmi menerbitkan UU 17/2023, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah. Seperti mensosialisasikan UU 17/2023 kepada masyarakat luas agar dapat mengetahui betul manfaat positif UU tersebut. Serta alasan penggantian UU Kesehatan dari yang sebelumnya.



Tercatat, UU 17/2023 diteken Presiden Joko Widodo Selasa (8/8/2023) kemarin dan diundangkan pada tanggal yang sama. Regulasi yang mendapat penolakan dari berbagai kalangan mulai dari kalangan tenaga medis, kesehatan, dokter, serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil lainnya berisi 458 pasal, dan 20 bab. Pada bab terakhir mengatur tentang penutup yang memuat 6 pasal yakni 453-458.

Pasal 454 UU 17/2023 mengatur 11 UU yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pertama, UU No.419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras (Staatsblad 1949 Nomor 419). Kedua, UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Ketiga, UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Keempat, UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kelima, UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Keenam, UU No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Ketujuh, UU No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Kedelapan, UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kesembilan, UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Kesepuluh, UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kesebelas, UU No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

*“Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”
begitu bunyi Pasal 454 UU 17/2023.*

Kendati menyatakan 11 UU itu tak berlaku, tapi peraturan pelaksana dari berbagai UU tersebut masih dinyatakan berlaku sepanjang tak bertentangan dengan ketentuan dalam UU 17/2023. Setidaknya ada 10 UU yang peraturan pelaksanaannya masih berlaku sebagaimana ketentuan tersebut. Yakni UU 4/1984, UU 29/2004, UU 36/2009, UU 44/2009, UU 20/2013, UU 18/2014, UU 36/2014. Kemudian UU 38/2014, UU 6/2018 dan UU 4/2019 Mulai UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan lama, UU Rumah Sakit hingga UU Tenaga Kesehatan

“(PP, red) Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini,” begitu kutipan Pasal 453.

Selain itu bab penutup UU 17/2023 mengatur 5 pasal yang berlaku ketika UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga berlaku. Kelima pasal itu meliputi Pasal 427, Pasal 428, Pasal 429, Pasal 431, dan Pasal 432. Tak ketinggalan beleid ini memerintahkan aturan pelaksana dibentuk paling lambat 1 tahun sejak UU 17/2023 diundangkan. Artinya sebelum 8 Agustus 2024 seluruh aturan teknis UU 17/2023 diupayakan harus terbit.

Peralihan

Lebih lanjut, Bab 19 UU 17/2023 mengatur tentang peralihan yang terdiri dari 4 pasal. Yakni Pasal 449, Pasal 450, Pasal 451, dan Pasal 452. Pasal 449 mengatur Surat Tanda Registrasi (STR), STR Sementara, STR Bersyarat, dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP. Penerbitan STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP.

“Penerbitan STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan SIP yang masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini,” demikian redaksional Pasal 449 huruf c UU 17/2023.

Kemudian Pasal 450 menyebutkan, “Pada saat UU ini mulai berlaku, Konsil Kedokteran Indonesia, Konsil Kedokteran, Konsil Kedokteran Gigi, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/ atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil sebagaimana dimaksud dalam pasal 26A dan majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304 yang dibentuk berdasarkan UU ini”.

Sedangkan Pasal 451 mengatur kolegium yang dibentuk setiap organisasi profesi tetap diakui sampai ditetapkannya kolegium sebagaimana Pasal 272. Pasal 452 UU 17/2023 memandatkan pengaduan atas pelanggaran disiplin tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam masa peralihan dilakukan melalui 2 cara.

Pertama, pengaduan dalam proses di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau konsil masing-masing tenaga kesehatan dan telah selesai proses verifikasi, klarifikasi, dan/atau pemeriksaan diselesaikan berdasarkan prosedur yang berlaku sebelum beleid ini diundangkan. Kedua, jika masih proses awal di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau konsil masing-masing tenaga kesehatan dan belum dilakukan proses verifikasi, klarifikasi, dan/atau pemeriksaan, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2023.

BERITA TERKINI | SUMBER: HUKUMONLINE.COM

Pembaruan Kerangka DHE dan DPI: Mekanisme Pemasukan DHE Disesuaikan dan Nilai Minimum-Insentif Penempatan DHE SDA Dikenalkan

Dalam upaya meningkatkan pasokan devisa dalam perekonomian nasional Indonesia, serta memastikan ketentuan yang secara khusus mengatur Devisa Hasil Ekspor ("DHE") dan Devisa Pembayaran Impor ("DPI") sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam ("Peraturan 36/2023"),^[1] Bank Indonesia ("BI") telah menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan dan Devisa Pembayaran Impor ("Peraturan 7/2023") yang berlaku sejak 1 Agustus 2023.^[2]

Pemberlakuan Peraturan 7/2023 kini secara bersamaan mencabut dan menggantikan kerangka sebelumnya untuk DHE dan DPI tersebut di atas, sebagaimana secara khusus diatur dalam Peraturan BI No. 21/14/PBI/2019, yang berjudul sama,^[3] sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan BI No. 24/18/PBI/2022 (secara bersama- sama disebut sebagai "Peraturan 14/2019").^[4]

Dengan latar belakang di atas, Edisi Indonesian Legal Brief ("ILB") ka ini menawarkan ringkasan ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan 7/2023 dan membandingkannya dengan kerangka Peraturan 14/2019 sebelumnya. Namun, karena sifat luas dari ketentuan yang terkandung di bawah kerangka baru, kami membatasi analisis kami pada topik-topik berikut:

1. Penyesuaian mekanisme penyetoran DHE;
2. Penempatan DHE dari eksploitasi, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam ("SDA"): instrumen, nilai minimum dan insentif.



Penyesuaian Mekanisme Penyetoran DHE

Pada intinya, Peraturan 14/2019 sebelumnya mengamanatkan bahwa eksportir harus menerima seluruh DHE nya melalui dan/atau menyetorkan seluruh DHE nya ke (khususnya DHE berbentuk tunai yang diterima di dalam negeri) bank umum syariah atau bank umum ("Bank")^[5] paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) yang bersangkutan.^[6]

Namun, Peraturan 7/2023 kini secara eksplisit menyatakan bahwa DHE tersebut harus ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia, termasuk melalui Bank dan/atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI"). Rincian mekanisme pemasukan yang berlaku diuraikan sebagai berikut:^[7]

LEMBAGA KEUANGAN		KLASIFIKASI DHE		NILAI EKSPOR MINIMUM
Bank	LPEI	SDA	Non-SDA	
✓			✓	Tidak diatur
✓		✓		Kurang dari USD 250.000 atau ekuivalennya
✓	✓	✓		Minimum dari USD 250.000 atau ekuivalennya

Berdasarkan kerangka Peraturan 14/2019 sebelumnya, DHE SDA wajib diterima dan/atau disetorkan ke rekening khusus DHE ("Rekening Khusus") di satu atau lebih Bank. Namun, sebagai konsekuensi dari pengenalan LPEI sebagai sarana penyimpanan DHE SDA tersebut di atas, setiap DHE SDA yang dikategorikan dalam tulisan bercetak tebal pada tabel di atas juga dapat disetorkan ke dalam Rekening Khusus di LPEI.^[8] Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan 7/2023 kini mengklarifikasi bahwa pemasukan berbasis LPEI tersebut hanya boleh dilakukan terkait dengan transaksi ekspor debitur LPEI.^[9]

Sebagai perbandingan, mekanisme penyetoran DHE SDA yang dijelaskan di atas melalui LPEI tidak terdapat dalam kerangka Peraturan 14/2019 sebelumnya.

Penempatan DHE SDA: Instrumen, Nilai Minimum dan Insentif

Sebelumnya, Peraturan 14/2019 mengizinkan eksportir SDA untuk menempatkan dana Rekening Khusus ke dalam instrumen yang tersedia berikut ini: 1) Deposito DHE SDA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan; 2) Term deposit untuk operasi pasar terbuka konvensional dalam mata uang asing di BI ("Term Deposit"); dan/atau 3) Instrumen lain yang ditetapkan oleh BI.^[10] Namun, Peraturan 7/2023 kini telah menyesuaikan instrumen penempatan tersebut, artinya penempatan tersebut kini harus dilakukan melalui salah satu instrumen berikut:

Instrumen Penempatan ^[m]	Bentuk Instrumen ^[12]
Rekening Khusus di LPEI dan/atau Bank	Valuta asing
Instrumen perbankan	Deposito valuta asing
Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI	Promissory note valuta asing
Instrumen BI	Term Deposit
Instrumen lain yang ditetapkan oleh BI	

Yang baru tercantum dalam Peraturan 7/2023, instrumen-instrumen tertentu, sebagaimana diuraikan di atas, dapat digunakan untuk berbagai transaksi atau tujuan lain, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

INSTRUMEN	Pemanfaatan oleh Eksportir		Pemanfaatan oleh Bank	
	Agunan Kredit Rupiah dari Bank dan/atau LPEI ^[13]	Transaksi FX Swap dengan Bank ^[14]	Underlying Transaksi Swap Lindung Nilai dengan BI ^[15]	Transaksi Swap Bank dengan BI ^[16]
Valuta asing	✓	✓	✓	
Deposito valuta asing	✓		✓	
Promissory note valuta asing	✓			
Term Deposit	✓		✓	✓
Instrumen lain yang ditetapkan oleh BI	✓		✓	

Selanjutnya, BI dapat memberikan insentif penyetoran DHE SDA kepada eksportir yang memanfaatkan Term Deposit dan/atau instrumen lain yang diterbitkan BI tersebut di atas.^[17] Penting juga untuk dicatat bahwa Peraturan 7/2023 kini mensyaratkan minimum 30% dari setiap DHE SDA yang sebelumnya telah disetorkan ke dalam Rekening Khusus untuk ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia selama minimum tiga bulan setelah penyetoran yang relevan.^[18] Kelalaian dalam memenuhi kewajiban penempatan dalam negeri ini dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.^[19]

Sebagai perbandingan, pemanfaatan instrumen penempatan wajib yang dijelaskan di atas, kewajiban nilai minimum dan insentif tidak dicantumkan dalam Peraturan 14/2019.^(NR)

[1] Peraturan 7/2023 secara singkat dibahas dalam ILB No. 4674.

[2] Bagian "Menimbang" dan Pasal 69, Peraturan 7/2023.

[3] Peraturan 14/2019 secara singkat dibahas dalam ILB No. 3771.

[4] Pasal 68, Peraturan 7/2023.

[5] Pasal 1 (1), Peraturan 14/2019.

[6] Pasal 1 (32) dan 2 (1 - 2), Peraturan 14/2019.

[7] Pasal 2 (2), Peraturan 7/2023.

[8] Bandingkan Pasal 18 (1 - 4), Peraturan 14/2019 dengan Pasal 18 (1), Peraturan 7/2023.

[9] Pasal 18 (2), Peraturan 7/2023.

[10] Pasal 19 (1), Peraturan 14/2019.

[11] Pasal 20 (1), Peraturan 7/2023.

[12] Pasal 20 (3), Peraturan 7/2023.

[13] Pasal 20 (4), Peraturan 7/2023.

[14] Pasal 20 (5), Peraturan 7/2023.

[15] Pasal 20 (6), Peraturan 7/2023.

[16] Pasal 20 (7), Peraturan 7/2023.

[17] Pasal 21 (1), Peraturan 7/2023.

[18] Pasal 19 (1 - 2), Peraturan 7/2023.

[19] Pasal 19 (3), Peraturan 7/2023.

Acara Mendatang

FORUM BISNIS

Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN)

13 September 2023 | Hall & Mall Kota Kasablanka



Info lebih lanjut:
main.psnsewindu.id

SEREMONIAL

Penyerahan White Paper Indonesia Emas

22 September 2023 | Ibu Kota Negara Nusantara

PAMERAN

Trade Expo Indonesia

18-20 Oktober 2023 | Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City



Info lebih lanjut:
tradexpoindonesia.com



Sekilas Tentang Kadin for Naker

Kadin for Naker merupakan **program pengembangan kapasitas** inisiatif Kadin Indonesia bersama dengan Serikat Buruh di Indonesia dan didukung oleh Pijar Foundation.

Manfaat Kadin for Naker untuk Pekerja

-  Materi pembelajaran yang dapat diakses **kapan saja**
-  Materi yang disesuaikan dengan **kebutuhan industri**
-  Lowongan kerja dari perusahaan yang **terverifikasi**

Manfaat Kadin for Naker untuk Perusahaan

-  Sarana **peningkatan kualitas SDM** bagi perusahaan
-  **Keterampilan pekerja** yang terverifikasi
-  Peningkatan kapasitas pekerja untuk kinerja yang **lebih optimal**
-  Pencarian tenaga kerja berdasarkan **kompetensi** yang dicari

Kategori Kelas di Kadin for Naker

Mencari Pekerjaan

Pengembangan Diri

Mencari Pendapatan Tambahan

Program Komputer

Bahasa

Keterampilan Industri Spesifik

Tata Cara Mendaftar Kadin for Naker



WIKI WIRAUSAHA

Platform digital yang berfungsi sebagai wadah bagi UMKM, Perusahaan, Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung UMKM Indonesia untuk naik kelas

Akses pasar

Akses keuangan

Pelatihan

Kemitraan inklusif

Direktori UMKM



Banyak sekali ilmu dan skill yang saya dapatkan setelah mengikuti program ini. Materinya mudah untuk dipahami, sehingga ilmunya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari bahkan di bisnis yang saya geluti selama ini.

Achmad Muzamil

Pengusaha asal Wonosobo

Mari bergabung dan tampilkan profil perusahaan anda agar terhubung dengan berbagai calon Mitra Perusahaan atau UMKM lainnya.



wikiwirausaha.id

Daftar ke:

wikiwirausaha@kadin.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950

“Menuju Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan”

NZH adalah sebuah inisiatif dari dunia usaha untuk mencapai *Net Zero Emission* di Indonesia. Bersama Kadin, mari wujudkan komitmen perusahaan anda menuju *Net Zero*, melalui:

Science Based Emission

Emission Reduction

Climate Mitigation

Climate Adaptation

Daftar sekarang juga ke

secretariat@netzerohub.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950



Netzerohub.id



KADIN INDONESIA

Informasi lanjutan terkait
pasar internasional dapat
ditemukan di sini:



bsd-kadin.id

Temukan informasi menarik
bagi **pengembangan bisnis**
UMKM di sini:

WIKI WIRAUSAHA



Wikiwirausaha.id

Temukan layanan
pengurusan dokumen
dagang di sini:



edocs.kadin.id

Ikut bergabung dalam
ekosistem **bisnis**
berkelanjutan di sini:



Netzerohub.id

Kembangkan kapasitas
dan kesempatan meningkatkan
jenjang karir di sini:



kadinforaker.id

Disusun oleh
Humas Sekretariat Kadin Indonesia

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | Telp. 021-5274484



[kadin.indonesia.official](https://www.instagram.com/kadin.indonesia.official)



[kadin_indonesia](https://twitter.com/kadin_indonesia)



[kadinindonesiaofficial](https://www.youtube.com/kadinindonesiaofficial)



[kadinindonesia](https://www.tiktok.com/kadinindonesia)



www.kadin.id